

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA: PENANGKALAN DAN DIPLOMASI KEKERASAN <i>Prilla Marsingga</i>	1
PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN <i>Agus Haryanto</i>	17
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN P ERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM) <i>Santi Suwandi</i>	29
FLEKSIBILISASI DAN KERENTANAN PASAR KERJA INDONESIA <i>Wulani Sriyuliani</i>	45
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN <i>MONEY LAUNDERING</i> DAN <i>DRUGS TRAFFICKING</i> DI INDONESIA <i>Rahmi Fitriyanti</i>	59
POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL <i>Ipit Zulfan, Gumgum Gumilar</i>	77
PERAN KOMUNIKASI DALAM AKTUALISASI STATUS SOSIAL <i>M. Ali Syamsuddin Amin</i>	87
KAJIAN AKADEMIK KEBERADAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK KEMBALI MENJADI DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI <i>Fernandes Simangunsong</i>	97
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) <i>Rino Adibowo</i>	115
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Lukman M. Fauzi, Angga Nurdin R, Iing Nurdin</i>	127

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT)

Rino Adibowo

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 400132, Indonesia

E-mail: renoreno648@yahoo.com

Abstract

This study, entitled Implementation of Coastal Community Economic Empowerment Policy (Studies in Rural Karangsong Indramayu district of West Java province) aims to find out the Department of Fisheries and Marine Resources in implementing Economic Empowerment Policy of Coastal Communities and the obstacles it face. The location chosen for this study is Karangsong village in Indramayu district. Site selection was done as it relates to the economic empowerment of coastal communities, which when seen from the condition of its people there are differences. This research uses descriptive method with qualitative approaches and purposive techniques. Data sources include primary data and secondary data. The primary data obtained through in-depth interviews and participatory observation regarding the non-implementation of the policy of economic empowerment of coastal communities. While the secondary data obtained in the form of written sources on economic empowerment of coastal communities. The result of this study indicates that the implementation of the policy of economic empowerment of coastal communities is not only the duty of the government alone to run at max, but requires cooperation with various parties, both institutional and community parties. Obstacles in the implementation of economic empowerment policy of coastal communities, are the government's commitment in policy implementation, education level of coastal communities, and community orientation on economic empowerment that still see from the financial standpoint and not understanding that prioritizes aspects of empowerment of coastal communities as a target so that the main purpose of the program remains consistent and maintained.

Keyword: implementation, policy, empowerment

Abstrak

Penelitian berjudul *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)* ini bertujuan untuk mengetahui Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Hambatan yang dihadapinya. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang apabila dilihat dari kondisi masyarakatnya memiliki perbedaan. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi non-partisipatif mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijak, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi

masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah berorientasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Semangat desentralisasi menghendaki pemberian pelayanan terbaik melalui pemberdayaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga secara otomatis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan hasil atau dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Kebijakan di tingkat daerah atau provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kemudian kebijakan di tingkat Kabupaten juga mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candiki.

Kebijakan ini tentunya di implementasikan oleh pemerintah daerah kabupaten indramayu yang dalam hal ini di delegasikan kewenangannya kepada dinas perikanan dan kelautan kabupaten

indramayu. Lemahnya implementasi kebijakan di lapangan dapat dikatakan sebagai kurang berhasilnya pemerintah dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir. Hal tersebut dapat dilihat dari terbatasnya dalam mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi di tingkat desa.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir terutama di wilayah Kabupaten Indramayu merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan langkah arif yang diambil guna menanggulangi kemiskinan, namun dalam hal penanggulangan kemiskinan secara nasional, pemerintah pusat hanya bisa menyelidiki masalah kemiskinan sebatas data dari jumlah masyarakat miskin tanpa dapat mengetahui lebih jelas penyebab kemiskinan tersebut. Padahal penyebab kemiskinan dari masing-masing daerah itu berbeda-beda, begitu pula dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah

yang berbeda pula, sehingga proyek-proyek penanggulangan kemiskinan dari pusat tidak dapat menanggulangi kemiskinan secara tuntas di daerah.

Sekarang ini pembangunan masyarakat pesisir mulai menjadi fokus utama akibat terjadinya ketertinggalan pada masyarakat pesisir, karena selain terbatasnya dalam mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi di tingkat desa. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir semakin tertinggal. Direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat pesisir. Hal ini ditempuh dengan memberikan penguatan baik yang bersifat ekonomi kelembagaan maupun yang sosial budaya yang muaranya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran PEMP adalah masyarakat pesisir yang memiliki mata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, yang kurang berdaya dalam peningkatan/penguatan usahanya. Program ini menggunakan model pengembangan usaha yang bersifat perguliran/*revolving* yang dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat. Pinjaman modal melalui dana ekonomi produktif masyarakat yang diterima oleh sasaran wajib untuk dikembalikan agar terjadi perguliran kepada masyarakat pesisir lainnya yang membutuhkan serta terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang terjadi sebelum adanya kebijakan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini, seperti adanya masalah sosial yang mencakup kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial, dan konflik sosial yang

terjadi secara internal pada masyarakat pesisir. Setelah adanya kebijakan tersebut maka diharapkan akan memberikan perubahan pada masyarakat pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun 2006 dan Hambatan apa yang dihadapinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan dan mengetahui Hambatan seperti apa yang dihadapi dalam Mengimplementasikan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun 2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini selain untuk kepentingan akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi atau bahkan sebagai solusi bagi institusi dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu juga dapat diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Aspek teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang teori implementasi kebijakan.
2. Aspek praktis (guna laksana) adalah hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan dan solusi dari masalah yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa

Karangsong Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan lahir dari suatu permasalahan yang bersifat non-individual dan diperlukan suatu solusi yang bersifat secara menyeluruh dengan menggunakan suatu pemikiran dan pengetahuan. Berikut ini merupakan tinjauan mengenai implementasi kebijakan, maka ada baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai kebijakan. Secara umum, kebijakan menurut Siagian (1985:42) adalah serangkaian keputusan. Secara lebih lengkap lagi Siagian menyatakan bahwa: Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar digunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dapat pula dikatakan bahwa kebijakan merupakan peta jalan yang memberikan petunjuk tentang arah yang seyogyanya ditempuh sehingga perjalanan yang dilakukan berlangsung aman, efisien, dan efektif (Siagian, 1985:49). Menurut pendapat Nigro and Nigro yang dikutip oleh Islamy, ada beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu: Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, Adanya pengaruh kebiasaan lama, Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, Adanya pengaruh dari kelompok luar, Adanya pengaruh keadaan masa lalu (Nigro and Nigro dalam Islamy, 2004:25-26).

Kebijakan yang dirumuskan oleh aktor atau badan-badan pemerintah pada dasarnya merupakan suatu upaya solusi dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*) dari masalah-masalah publik yang ada dan berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, mengingat sifatnya yang *problem solving* maka dapat dikatakan

bahwa kebijakan yang diterapkan tersebut tentunya mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich (dalam Wahab, 2005:3) yaitu: Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan merupakan suatu aksi atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya dilaksanakan berdasarkan suatu tujuan. Adapun kebijakan tersebut bersumber dari adanya suatu pemahaman, pengetahuan, usulan dan saran yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dapat dikatakan juga bersumber dari pemerintah. Pelaksanaan kebijakan itu sendiri tidak selalu berjalan dengan maksimal, artinya adanya hambatan-hambatan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut tentunya memiliki solusi agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

2.2 Implementasi Kebijakan

Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa "*Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*". Kemudian Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa: "*Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects*".

Dalam melengkapi pengertian implementasi di atas, menurut Edwards III yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah: Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Edwards III dalam Winarno, 2002:125-126).

Jones (1984:166) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan seperangkat aktivitas sebagai berikut: *Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. Three activities, in particular, are significant:*

1. *Organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a program into effect.*
2. *Interpretation: The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application: The routine provision of services, payments, or other agreed upon program objectives or intrusion.*

Dalam suatu kebijakan akan selalu terdapat berbagai hambatan, baik itu bersifat resiko kegagalan (*policy failure*) atau pun ketidakberhasilan implementasi kebijakan (*unsuccessful implementation*) dari pada implementasi kebijakan tersebut. menurut Hogwood dan Gunn (1986:86) ada dua katagori, yaitu *non implementation*

(tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

Dalam melengkapi pengertian implementasi di atas, menurut Edwards III yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah: Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Edwards III dalam Winarno, 2002:125-126).

Jadi implementasi kebijakan dalam pembuatannya melalui adanya suatu tahapan, tahapan tersebut dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh masyarakat karena dengan melibatkan masyarakat maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil. Akan tetapi walaupun kebijakan tersebut sudah tepat dan mengikutsertakan masyarakat maka akan mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh kurang diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu apabila suatu kebijakan dapat berhasil maka dalam prosesnya harus melibatkan masyarakat dan juga dalam mengimplementasikan kebijakan harus maksimal sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Proses Implementasi Kebijakan

Secara umum proses implementasi dikemukakan Grindle (1980:7) sebagai

berikut: *The general process of implementation thus can begin only when general goals and objectives have been specified, when action programs have been designed, and when funds have been allocated for the pursuit of the goals. These are basic conditions for the execution of any explicit public policy.* Berdasarkan uraian tersebut Grindle mengemukakan isi kebijakan itu mencakup: “(1) kepentingan yang terpengaruhi kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuatan kebijakan; (5) pelaksana program; dan (6) sumber daya yang dikerahkan”. Dengan demikian isi kebijakan yang jelas dan rinci akan memudahkan pelaksanaan kebijakan. Isi kebijakan yang rinci dapat digunakan pula sebagai indikator dari efektivitas pencapaian tujuan.

Smith (1977:261) menyatakan yang disebut dengan “*the implementing organization*” yaitu birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, dimana organisasi ini dipandang sebagai wahana atau wadah melalui dan dalam berbagai kegiatan dilaksanakan.

Sejalan dengan unsur-unsur dalam proses implementasi kebijakan seperti dikemukakan di atas, Kortein (dalam Tjokroamidjodjo, 1996) dengan teorinya ‘*three way fit*’ atau ‘kesesuaian tiga arah’, menjelaskan bahwa ketiga unsur implementasi tersebut harus ada kesesuaian, sehingga output yang diharapkan dari implementasi itu akan sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga unsur tersebut yaitu organisasi pelaksana, program dan kelompok sasaran yang dipengaruhi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan objektif dan masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi

organisasi dengan berbagai sumber dan memobilisasikannya untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program tadi akan sesuai dengan kebutuhan publik.

2.2.2 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Edwards III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu: 1. *Comunication*; 2. *Resources*; 3. *Disposition*; 4. *Bureaucratic Structure* (Edwards III 1980:10-12). Pelaksanaan kebijakan merupakan tindakan nyata dan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran ini bukan merupakan konsep yang tidak ada penyelesaian melainkan perlu adanya realisasi yang nyata dan tidak menyimpang dari syarat-syarat pelaksanaan kebijakan. Hoogerwerf (1983:163) mengemukakan bahwa : “Untuk berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan maka diperlukan syarat-syarat yang mendukung pelaksanaan kebijakan yaitu isi kebijakan, tingkat informasi aktor aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan dan pembagian potensi”.

2.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang artinya kekuatan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu Sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan

kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Menurut Carver & Clatter Back (Rosmidi, 2006:3) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: "Upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggungjawab perorangan guna meningkatkan cara kerja mereka dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi". Selanjutnya Kartasasmita (1996:159) mengatakan "Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya."

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan: Pertama, kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fitness*). Landasan teori yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah teori yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996:159) yang menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jalan antara lain:

- 1) Menciptakan suasana iklim yang kondusif yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), yaitu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya;
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan,

dan derajat kesehatan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana fisik seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah;

- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protection*), melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena disesuaikan dengan kondisi dengan cara memperoleh data-data penunjang penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara serta menganalisa hasil pengamatan dan wawancara tersebut berupa tulisan yang mendeskripsikan kondisi masyarakat pesisir yang sesuai dengan fakta yang ada.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pengembangan Organisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Menjalankan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Indramayu.

Organisasi yang ada ditingkat daerah dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan tidak ada tim khusus atau pembentukan organisasi secara khusus. Kepala dinas menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak ada pembentukan tim atau pun staff khusus, melainkan

dipimpin langsung oleh Kepala Dinas secara struktural. Kepala dinas membentuk suatu forum sebagai wujud pelaksanaan dari fungsi organisasi kedinasan, akan tetapi forum tersebut bukan dari pihak eksternal melainkan dari pihak internal dinas perikanan dan kelautan kabupaten indramayu yang kemudian diketuai oleh kepala dinas itu sendiri. Pembentukan forum tersebut ditujukan sebagai langkah dalam melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat.

Pengembangan organisasi melalui program yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan pemerintah kabupaten indramayu dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya berupa fisik saja, akan tetapi melakukan pemberdayaan dengan cara mengoptimalkan dari sumberdaya alam yang ada dan tentunya melibatkan dan didukung oleh masyarakat di kawasan pesisir. Dengan melibatkan mereka secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui ikut terlibatnya masyarakat dalam mengelola wisata laut dan menjaga ekosistem laut.

4.2. Pedoman Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Perda No.14 tahun 2006, tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Gosong dan Candika, yang merupakan aturan dasar bagi dinas perikanan dan kelautan dalam melaksanakan program kerjanya. Dari perda tersebut kemudian diturunkan kembali menjadi suatu peraturan yang berasal dari internal instansi yang digunakan sebagai pedoman kerja pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Adapun peraturan tersebut, antara

lain:

Strategi dan arah kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi akses informasi teknologi, modal dan pemasaran hasil bagi para pelaku kegiatan perikanan dan kelautan,
2. Memberikan peluang pengembangan kualitas dan kuantitas aparatur secara proporsional,
3. Mewujudkan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai dan terpelihara,
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang memadai dan terpelihara,
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memadai dan terpelihara,
6. Mewujudkan sarana dan prasarana kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memadai dan terpelihara,
7. Mewujudkan kepedulian perlindungan sumberdaya dan lingkungan.

(Sumber: Profil Diskanla 2013)

4.3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dapat Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yaitu melalui program hasil tangkap ikan, budidaya tembakau atau mangrove dan melibatkan masyarakat dalam wisata laut. Program hasil tangkap ikan disini tentunya dilakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini pemerintah sebagai aktor kebijakan yang membuat dan menentukan arah kebijakan tersebut kepada masyarakat guna untuk melindungi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pemerintah setempat

memfasilitasi dengan cara membuka dermaga karang song yang berada di pesisir pantai karangsong serta membuat sarana pendukung lainnya seperti adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mana sarana ini difungsikan sebagai tempat transaksi para nelayan dengan berbagai pihak kepentingan lainnya untuk proses pelelangan ikan. Tempat tersebut di jaga oleh pihak yang berwajib yang bertujuan agar proses pelelangan ikan dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Sedangkan program pemberdayaan yang lain yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan bekerjasama dengan dinas kehutanan, yaitu program budidaya tembakau (*mangrove*). Program ini melibatkan banyak pihak, yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai contoh. Dengan konsep membentuk kelompok dan memiliki anggota bagi tiap-tiap kelompok tersebut, yang kemudian masing-masing kelompok memiliki program yang berbeda. Program yang dilakukan tidak hanya memberikan motivasi agar mereka dapat bekerja akan tetapi memberikan pengetahuan, wawasan, dan tentunya memberikan gambaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam melalui menanam tembakau.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Organisasi dan kelembagaan PEMP di Kabupaten Indramayu melibatkan beberapa pihak didalamnya, yaitu : pemerintah daerah, dinas perikanan dan kelautan, dinas kehutanan, kalangan akademisi dan kelompok masyarakat. Berdasarkan keterlibatan tersebut, para pelaksana program PEMP yang ada belum maksimal sebagai sumberdaya manusia apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat pesisir yang ada, sehingga memerlukan kerjasama

dengan pihak yang lainnya agar PEMP dapat terlaksana dengan maksimal. Penafsiran kebijakan diperoleh melalui kejelasan prosedur kerja, kejelasan program kerja PEMP di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk penafsiran aparatur mengenai kebijakan PEMP ini dinilai sudah cukup baik.

Penafsiran aparatur tersebut dikatakan baik, dilihat dari program kerja yang ada di internal instansi yang tersusun sesuai dengan perencanaan yang ada, sehingga dalam melaksanakan program pun sesuai dengan kebijakan internal yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu.

5.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran tersebut, sebagai berikut:

1. Prosedur pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan atau kondisi masyarakat.
2. Tersedianya sarana infrastruktur yang representatif bagi terbukanya akses kredit masyarakat pesisir terpencil dan skala kecil.
3. Merumuskan kembali mengenai program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir yang lebih tepat sasaran.
4. Kemudahan akses informasi untuk masyarakat pesisir, baik secara jaringan teknologi maupun memfungsikan dengan maksimal peran dari pemerintah setempat (Kepala Desa, Lurah dan Camat) sebagai jembatan informasi untuk mereka.

6. Perlunya memberikan pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah yang luas lagi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya pemberdayaan tidak hanya sebatas pada aspek finansial dan pelaksanaan tugas-tugas rutin saja.

Daftar Pustaka:

Acuan dari Buku:

- Adimiharja, Kusnaka. 1993. *Kebudayaan dan Lingkungan: Studi Bibliography*. Bandung: Ilham Jaya.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson. J. E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Budiharsono, Sugeng. 2004. *Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PS SPL) IPB. Bogor.
- _____, 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Creswell. John W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: Second Edition*. London: Sage Publication Ltd
- 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Dahuri, Rokhmin. 2004. *Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional*. Makalah pada acara Ocean Out Look BEM FPIK – IPB Tanggal 16 Mei 2004. Bogor.
- Denzim, Norman, K dan Yvonna S. Lincoln. (2005). *Handbook of Qualitative Research*. California:Sage Publications Inc.
- Dunn William N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Terjemahan Wibawa, Samudra dkk, Yogyakarta: Fakultas Isipol Universitas Gadjah Mada.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dye, T.R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewoo Cliffs, New Jersey: Prentic Hall, Inc.
- Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C USA: Congressional Quaterly Press.
- Faisal, S. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Hogwood B. W. and Gunn. (1984). *Policy Analysis for The Real World*. London : Oxford University Press.
- Hoogerwerf, A. (1983). *Ilmu Pemerintahan*, penerjemah: R.L.L. Tobing, Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan. (1994). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. (1984), *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition, Monterey, California : Brooks/ Cole Publishing Company.
- (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* penterjemah Ricky Ismanto, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

- Marshall and Rossman. (1999). *Designing Qualitative Research , 3rd Ed.* London: Sage Publications
- Maxwell, Joseph A. (2005). *Qualitative Research Design, An Interactive Approach.* California:Sage Publication, Inc.
- Mazmanian, Daniel A & Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy.* United State Of America: Scott, Foresman and Company.
- Merriam, Sharan B. (2009). *Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation.* San Fransisco:John Wiley & Sons, Inc.
- Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik,* Jakarta: LAN-Dutapertiwi Foundation.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda.
- Nigro, A Felix dan Nigro G Lloyd (1970). *Modern Public Administration.* New York: Haper & Row Publisher.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Metodelogi Ilmu Pemerintahan,* Jakarta: Rineka Cipta
- PEMP TA 2001 - 2003. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- _____, 2003. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.* Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta .
- Priyono, S, Onny dan Pranaka A.M.W. (1996). *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.
- Ripley, B Randall & Franklin Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy (second edition).* Chicago Illinois: The Dorsey Press.
- Robert K. Yin (2002). *Case Study Research. Design and Methods. Edisi ketiga. Applied social research method series Volume 5.* Sage Publications. California.
- Siagian Sondang P. (1985). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional.* Jakarta: Gunung Agung
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Sunggono. B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, AG. (2004). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Thoha, Mitfah. (1995). *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan A.R. Mustopadidjaja. (1996). *Kebijaksanaan dan Admininstrasi Pembangunan.* Jakarta: LP3ES.
- Van, Meter, Donald S & Vanhorn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Proses: A Conceptul Framework.* Ohio State University:Saga Publications Inc.
- Wahab, Abdul Solichin (2002). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Solichin. (1998). *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan yang Responsif dan Berkualitas.* Malang: PPs Unibraw Malang.
- (2001). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara,* Jakarta : Rineka Cipta

Wasistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.

Wibawa, Samodra. Et.all (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jogjakarta:Media Presindo.

Acuan dari Penelitian Sebelumnya:

Igit Suyanto, 2010. Skripsi : Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Tanjung Mas Semarang) : UNDIP.

Medi Mahendra, 2005. Tesis : Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kota Bandung. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Muhammad Junaidi, 2003. Tesis : Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Perubahan Perilaku Nelayan Di Nipah Panjang 1 Kabupaten Tanjung Timur

Provinsi Jambi). Depok: Universitas Indonesia.Nur Aini Nahuarury, 2012. Tesis : Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Bandung : Universitas Padjadjaran

Acuan dari Dokumen:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NO.PER.06/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candiki.